

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial Pendidikan Strata Satu Program Administrasi Negara*



Oleh:

**RIVI KANIA
NPM. 220411078**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

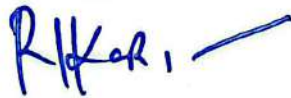
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Agustus
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

- 1 ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si (Pembimbing 1)
- 2 Dr. DESRIADI, S.Sos./M.Si (Anggota/Penguji 1)
- 3 EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Anggota/Penguji 2)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 100128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : RIVI KANIA
NPM : 220411078
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901



SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

TANDA ORSINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rivi Kania
Npm :220411078
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 07 Juli 2026
Yang membuat pernyataan


RIVI KANIA
NPM220411078

MOTTO

*Boleh lelah dalam menjalani proses, tetapi jangan menyerah pada keadaan.
Karena setiap langkah kecil yang dilakukan sengan sungguh-sungguh akan
membawa kita lebih dekat pada tujuan yang diimpikan*

Awalnya saya yakin bisa cepat selesai, ternyata skripsi punya rencana lain

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis persembahkan kepada :

1. Pertama dan yang paling utama, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, penulis dapat melewati setiap proses dan tantangan hingga mampu menyelesaikan karya ini. Di setiap langkah perjalanan, baik saat merasakan kebahagiaan maupun menghadapi berbagai kesulitan, Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keteguhan hati. Tiada daya dan upaya tanpa izin-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada orang tuaku tercinta, Ayah Herali dan Ibu Darwanis, yang telah menjadi sumber semangat, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap nasihat yang menguatkan, dan setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pernah mengharap balasan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang dan perjuangan Ayah dan Ibu dalam mengantarkan penulis hingga berada di titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, hormat, dan terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan. Semoga setiap langkah yang penulis tempuh dapat menjadi kebanggaan bagi Ayah dan Ibu serta menjadi awal untuk membalas segala kebaikan yang telah dicurahkan, meskipun penulis sadar bahwa jasa Ayah dan Ibu tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta selalu menjaga Ayah dan Ibu dalam lindungan-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

3. Dengan penuh cinta dan kerinduan, penulis mempersembahkan karya ini kepada almarhumah kakak tercinta, Oktaviharmi Yesi, yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Abang Dori Arfi Jumarfi atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Abang.
4. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul: **“Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.** Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam Program Studi Administrasi Negara.

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran dikalangan lulusan sarjana. Permasalahan ini menjadi penting mengingat meningkatnya jumlah sarjana yang belum terserap di dunia kerja, terutama di Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial sekaligus pembimbing II penulis.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus pembimbing I penulis.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kepala Dinas serta seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

8. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman terbaik penulis, Julika Deyanti, Afdelia Salina Rusdi, Miranda Meira Yola, Wahyu Aira Lestari, dan Mifta Huljannah, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, kebersamaan, serta menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan.
9. Tidak lupa penulis persembahkan karya ini kepada seluruh teman-teman kelas ANA A angkatan 2022, yang telah bersama-sama berjuang, berbagi pengalaman, dan menciptakan banyak kenangan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Kuantan Singingi, 20 November 2025

Hormat Penulis,

Rivi Kania

DAFTAR ISI

KATA PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Teori Administrasi Negara	7
2.1.2 Teori Kebijakan Publik	11
2.1.3 Teori Analisis Kebijakan	13
2.1.4 Teori Manajemen Strategi	16
2.1.5 Teori/Konsep Pengangguran Terdidik	20
2.1.6 Teori Indeks Pembangunan Manusia	22
2.1.7 Teori Strategi Kebijakan	25
2.1.8 Teori Administrasi Pemerintahan Daerah	29
2.1.9 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Kerangka Pemikiran	35
2.3 Hipotesis	36
2.4 Definisi Operasional	37
2.5 Operasional Variabel	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Informan Penelitian	40
3.3 Sumber Data	42
3.4 Fokus Penelitian	43
3.5 Lokasi Penelitian	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6.1 Wawancara	43

3.6.2 Observasi	44
3.6.3 Dokumentasi.....	44
3.6.4 Gabungan.....	44
3.7 Teknik Analisa Data	44
3.7.1 Reduksi Data	44
3.7.2 Penyajian Data	45
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	45
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	46
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	47
4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja	49
4.2.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja	49
4.2.2 Visi dan Misi	51
4.2.3 Struktur Organisasi.....	52
4.2.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	55
BAB VI PENUTUP	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	:Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	33
Tabel II.2	: Konsep variabel Analis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi	39
Tabel III.1	: Daftar Informan	41
Tabel III.2	: Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel V.1	: Identitas Responden Berdsarkan Jenis Kelamin	57
Tabel V.2	: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	58
Tabel V.3	: Identitas Responden Berdsarkan Tingkat Pendidikan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran	36
Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor Dinas Tenaga Kerja	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Wawancara
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.....
Lampiran 4	: Surat Permohonan Riset.....
Lampiran 5	: Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
Lampiran 6	: Catatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	: Lembaran Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian.....
Lampiran 8	: Lembaran Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian.....
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

Rivi Kania

NPM: 220411078

Pengangguran terdidik masih menjadi salah satu persoalan sosial ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan wirausaha, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat pengangguran terdidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Strategi, pengangguran, ketenagakerjaan, kebijakan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES TO ADDRESS EDUCATED UNEMPLOYMENT IN KUANTAN SINGINGI

By:

Rivi Kania

NPM:220411078

Educated unemployment remains one of the socio-economic problems in Kuantan Singingi Regency. The increasing number of graduates from secondary schools and universities has not been balanced with the availability of adequate employment opportunities. The local government has made various efforts such as skills training, entrepreneurship empowerment, and collaboration with the business and industrial sectors. However, these efforts have not fully been able to reduce the level of educated unemployment. This study aims to analyze the strategies of the local government in overcoming educated unemployment in Kuantan Singingi Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The results of this study are expected to provide input for the local government in improving the effectiveness of employment policies.

Keywords: : *Strategy, unemployment, employment, policy.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran terdidik masih menjadi salah satu persoalan sosial ekonomi yang menonjol di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika individu yang telah menempuh pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Secara logis, pendidikan yang tinggi diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Di sejumlah daerah yang sedang berkembang, peningkatan jumlah lulusan justru tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Kabupaten Kuantan Singingi juga menghadapi persoalan serupa. Meskipun daerah ini terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sebagian besar aktivitas ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan kecil. Sektor-sektor tersebut umumnya membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis, bukan lulusan berpendidikan tinggi. Akibatnya, banyak lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya. Ketimpangan antara jumlah tenaga kerja terdidik dan ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran di kalangan berpendidikan.

Selain keterbatasan lapangan kerja, penyebab lain yang cukup signifikan adalah ketidaksesuaian kompetensi (*skill mismatch*). Banyak lulusan pendidikan formal yang memiliki pengetahuan akademik, tetapi belum memiliki keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, dan daya adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja terdidik.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagai instansi teknis berperan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengoordinasikan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kewirausahaan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan informasi pasar kerja dan memfasilitasi hubungan antara pencari kerja dan pemberi kerja di tingkat daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi untuk menekan angka pengangguran terdidik, seperti penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda, pelaksanaan bursa kerja, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Namun demikian, efektivitas dari berbagai program tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat lulusan pendidikan

yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih perlu ditinjau kembali, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran program, kurangnya fasilitas pelatihan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Selain itu, ketersediaan data ketenagakerjaan yang akurat juga menjadi faktor penting dalam mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam perspektif administrasi negara, peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pengangguran merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif kebijakan publik, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi program, hingga evaluasi hasil kebijakan. Melalui proses tersebut diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan pengangguran terdidik secara lebih efektif.

Dari perspektif manajemen strategis, strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran terdidik perlu dirancang secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri, serta pengembangan program kewirausahaan bagi lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Permasalahan pengangguran terdidik juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Tingginya jumlah lulusan yang belum memperoleh pekerjaan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap keluarga, menurunnya motivasi kerja, serta berkurangnya produktivitas masyarakat. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi pengangguran terdidik. Melalui peningkatan kualitas program ketenagakerjaan, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, serta pengembangan potensi ekonomi daerah, diharapkan peluang kerja bagi lulusan pendidikan dapat semakin terbuka. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi pengangguran terdidik. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

Berikut ini adalah data pengangguran terdidik berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2023:

Tabel I.1 : Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2022	3.18%	6.32%	4.22%
2023	3.01%	4.51%	3.55%

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2022-2023.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa tingkat pengangguran terdidik perempuan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terdidik laki-laki, baik pada tahun 2022 maupun pada tahun 2023. Artinya, penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan sekolah menengah ke atas lebih terkonsentrasi pada pekerja laki-laki dibandingkan pekerja perempuan pada tahun 2022 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah: “Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi pengangguran terdidik. Analisis tersebut difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik di daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang diterapkan serta efektivitasnya dalam menanggulangi permasalahan pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan mafaat teoritis dengan memperkaya kajian ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran terdidik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik serta dasar pengembangan teori dan penelitian selanjutnya di bidang kebijakan ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, serta menjadi referensi bagi instansi terkait, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran terdidik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik, karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerja sama. (Suardita, 2016:2).

Administrasi negara (*public administration*) merupakan rangkaian aktivitas dalam mengelola, menyelenggarakan, dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh institusi-institusi negara untuk mewujudkan tujuan negara serta memenuhi kebutuhan publik. Bidang ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, hingga pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan.

Administrasi negara adalah sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. (Nugraha et al, 2022:10).

Menurut Jhon M. Pfiffner (dalam Inu Kencana, 2008:33) administrasi negara adalah bagian dari struktur negara yang berfungsi menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa administrasi negara menjadi sarana sekaligus proses yang dipakai pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan-tujuan tersebut hanya bisa tercapai apabila penyelenggaraan administrasi kenegaraan berjalan dengan baik dan tertata.

Menurut Arifin Abdulrachman (dalam Nugraha, 2022:20) administrasi negara merupakan bidang ilmu yang mengkaji bagaimana kebijakan politik negara dijalankan. Berdasarkan pandangan tersebut, administrasi negara dapat dipahami sebagai wujud konkret dari pelaksanaan politik pemerintahan. Berjalannya administrasi negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, yang pada akhirnya terbentuk melalui proses politik.

Administrasi negara memiliki sejumlah tujuan, salah satunya adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum (*social welfare*). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Leonard D. White (dalam Nugraha et al, 2022:11) yang menegaskan bahwa administrasi negara meliputi seluruh kegiatan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan negara.

Menurut Felix A. Nigro (dalam Suardita, 2016:5) menyimpulkan bahwa administrasi Negara adalah:

1. Usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik.
2. Meliputi seluruh cabang pemerintahan.
3. Mempunyai peranan penting dalam pormulasi kebijaksanaan.
4. Amat berbeda dengan administrasi swasta / privat.
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nugraha et al (2022:16-17) secara umum, administrasi negara dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas kerja sama antarindividu maupun antarkelompok yang berlandaskan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, serta prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Administrasi negara juga memiliki beragam fungsi sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ahli. Adapun fungsi-fungsi administrasi negara antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Henry Fanyol (dalam Nugraha et al., 2022:16) :
 - a. Fungsi merencanakan.
 - b. Fungsi mengorganisasikan.
 - c. Fungsi memimpin
 - d. Fungsi melaksanakan pengorganisasian.
 - e. Fungsi melaksanakan pengawasan.
2. Berdasarkan Hoessein (dalam Nugraha et al., 2022:16):
 - a. Fungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan publik.
 - b. Fungsi sebagai perumus kebijaksanaan.

- c. Fungsi sebagai memutuskan keputusan yang adil dan konkret berdasarkan konversi ketentuan hukum.
- d. Fungsi sebagai pelaku utama dalam merancang semua UU.

3. Berdasarkan tiga tingkatan umum hierarki:

- a. Fungsi pengarahan organisasi (tingkat atas). Fungsi ini mengutamakan pada proses jangka panjang suatu rencana yang ingin dicapai.
- b. Fungsi manajemen organisasi (tingkat menengah). Fungsi ini mengutamakan pada upaya antar sesama mempertahankan suatu organisasi dalam waktu jangka panjang.
- c. Fungsi pengawas (tingkat bawah). Fungsi ini mengutamakan pengarahan dalam penggunaan sumber dan menjalankan tugas secara profesional sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Nugraha et al., 2022:17).

4. Berdasarkan kesimpulan kelima paradigma administrasi negara

- a. Fungsi merumuskan kebijakan publik. Fungsi ini mengarah pada pemerataan, penyusunan strategi yang lebih terencana, dan menganalisis keadaan dan kondisi sekarang.
- b. Fungsi pengendalian perilaku organisasi. Fungsi ini mengarah pada struktur dalam organisasi administrasi, kepegawaian, dan pembekalan.
- c. Fungsi penggunaan teknologi manajemen publik. Fungsi ini mengarah pada adanya pengawasan, kepemimpinan organisasi, dan lancarnya koordinasi. (Nugraha et al., 2022:17).

Dalam konteks penelitian ini, teori administrasi negara digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam upaya mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi. Teori ini membantu memahami sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola program, berkoordinasi antarinstansi, serta menyediakan layanan publik yang efektif guna meningkatkan peluang kerja bagi lulusan yang belum terserap di pasar kerja.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (dalam Guntur, 2019:11) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining (1996:1) *the product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Analisis kebijakan publik pada dasarnya adalah bentuk rekomendasi atau masukan bagi para pembuat kebijakan, yang memuat identifikasi masalah yang sedang terjadi, kewajiban atau langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi publik untuk menanganinya, serta berbagai pilihan kebijakan yang dapat ditempuh lengkap dengan penilaiannya yang sesuai.

Sedangkan menurut pandangan George C. Edwards III (dalam Suwitri, 2022:8) yaitu kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Iriawan, 2024:1) kebijakan publik dipahami sebagai sebuah rangkaian program yang dirancang secara terencana dengan memuat tujuan, nilai, serta praktik tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perencanaan yang matang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, program tersebut menggambarkan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah atau masyarakat serta pola praktik yang digunakan dalam pelaksanaannya.

David Easton (dalam Iriawan, 2024:1) memberikan sudut pandang berbeda dengan menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan konsekuensi dari aktivitas pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik adalah hasil dari berbagai tindakan dan keputusan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Artinya, kebijakan publik mencakup seluruh langkah dan keputusan pemerintah yang menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat luas. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa rencana atau program, tetapi juga mencakup efek nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Nuryanti Mustari (dalam Anis Ribcalia Septiana et al, 2023:15) menjelaskan tentang elemen-elemen utama yang menyusun kebijakan publik yakni:

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (*aktor*), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak. Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentukbentuk kebijakan publik yang diterapkan.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi pengangguran terdidik melalui strategi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini diarahkan untuk membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan lulusan, serta mendorong peran aktif pemerintah dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.3 Teori/Konsep Analisis Kebijakan

Menurut Asmad (dalam Khairina, 2023:160-161) menyebutkan analisis kebijakan merupakan proses berpikir secara kritis dan aplikatif yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman, menilai secara mendalam, serta menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan. Lebih lanjut, analisis kebijakan bisa dianggap sebagai bidang studi yang memanfaatkan berbagai pendekatan penelitian yang beragam dalam konteks perdebatan dan argumentasi politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan.

E.S. Quade (dalam Abdoellah, 2016:76) mengemukakan tentang analisis kebijakan sebagai berikut: *"In a broad sense, policy analysis is a form of applied research carried out to acquire deeper understanding of sociotechnical issues and to bring about better solutions"* (dalam arti luas, analisis kebijakan adalah suatu bentuk riset terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah sosioteknis yang lebih dalam dan untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik). Lebih jauh dikemukakannya bahwa dengan berusaha menggunakan ilmu dan teknologi modern yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan mengadakan penyidikan (riset) untuk mendapatkan cara bertindak yang mungkin menghasilkan informasi dan menyusun fakta-fakta keuntungan dan akibat-akibat lain yang akan mengikuti adopsi dan implementasinya, untuk membantu pengambil keputusan memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Menurut Solihin Abdul Wahab (dalam Arbi, 2022:14) mendefinisikan Analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan

dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan.

Hamdi (dalam Nugroho Priyono Dwi, 2014:20) membagi tingkatan analisis kebijakan menjadi empat yaitu:

1. Analisis Meta

Analisis meta mempunyai filosofi bahwa kebijakan berproses seperti metamorphosis (metapora), yang penekanannya pada pendekatan penyusunan kebijakan dan bahasa yang digunakan dalam kebijakan. Analisis ini dilakukan pada tahap penyusunan masalah.

2. Analisis Meso

Analisis meso adalah analisis terhadap definisi masalah, penetapan agenda, dan pembentukan kebijakan. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh terkait dengan definisi masalah, penetapan agenda, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan.

3. Analisis Keputusan

Analisis keputusan merupakan analisis terhadap proses pembuatan keputusan atas alternatif-alternatif kebijakan. Perhatian pokok adalah "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana". Analisis ini dilakukan pada tahap pengambilan keputusan atas kebijakan.

4. Analisis Pelaksanaan

Analisis pelaksanaan merupakan analisis terhadap implementasi, evaluasi, dan dampak dari suatu kebijakan. Analisis pelaksanaan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan. Analisis dilakukan pada tahap evaluasi atau

menilai hasil dari kebijakan. Analisis ini merupakan pendekatan yang paling memungkinkan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mengambil peran secara aktif, walaupun analisis yang lain tidak ditutup kemungkinannya untuk dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Strategi

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (dalam Yatminiwati, 2019:4) pengertian manajemen strategis adalah *strategic management is that a set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporatio*, dan jika diterjemahkan secara bebas maka manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut George A. Steiner dan John B. Miner (dalam Untari, 2022:48) manajemen strategi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perumusan kebijakan/strategi puncak perusahaan dan implementasinya dalam organisasi publik dan swasta. Secara umum, cakupan manajemen strategis sangat luas, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Namun, secara garis besar ruang lingkup kajiannya dapat dipahami melalui beberapa poin berikut:

- a. Mengkaji serta menilai bagaimana penerapan manajemen strategis berdampak pada kondisi internal, terutama dalam upaya melakukan perbaikan yang bersifat berkelanjutan.
- b. Menjadikan kerangka manajemen strategis sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan organisasi, khususnya keputusan yang berkaitan dengan pencapaian keuntungan dan pengembangan usaha.

Dengan demikian, seluruh aktivitas yang mengarah pada dua tujuan tersebut selalu mengikuti prinsip-prinsip manajemen strategis.

- c. Menggunakan manajemen strategis sebagai dasar dalam penyusunan berbagai rencana, seperti perencanaan produksi, pemasaran, kepegawaian, maupun keuangan.

Menurut Nawawi (dalam Jamaludin et al, 2023:5) pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh, dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Perencanaan tersebut memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif, dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta layanan) kualitas, optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan strategis dan sasaran organisasi.

Menurut Fred R. David (dalam Untari, 2022.:1) manajemen strategi merupakan proses terpadu yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), pelaksanaan strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Perumusan strategi berkaitan dengan penetapan visi, misi, tujuan, serta perencanaan langkah untuk menghadapi permasalahan yang ada. Pelaksanaan strategi menekankan pada penerapan rencana melalui program kerja, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antarunit. Sementara itu, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi kendala, dan menentukan perbaikan yang diperlukan agar strategi tetap relevan dengan dinamika lingkungan. Dengan

demikian, konsep ini memberikan dasar analitis yang kuat dalam menilai bagaimana pemerintah daerah menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi strategi dalam mengatasi pengangguran terdidik.

Menurut John A. Pearce II dan Richard B. Robinson (dalam Jamaludin dan Nur, 2023:3) menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah perencanaan skala besar dan jangka panjang agar organisasi dapat berinteraksi secara efektif dalam produksi dan mengoptimalkan pencapaian baik tujuan strategis maupun operasional.

Menurut Budiman dan Suparjo (dalam Tsuraya et al, 2024:42-43) mengungkapkan manajemen strategik memiliki beberapa unsur dasar yang perlu dipenuhi yaitu:

a. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan adalah suatu cara untuk mempelajari segala sesuatu tentang suatu sekolah secara rinci. Analisis lingkungan ini mempengaruhi struktur organisasi sekolah, budaya, dan sumber daya.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah proses membuat gagasan manajemen yang akan bertahan lama untuk kemajuan suatu institusi atau sekolah. Perumusan strategi terdiri dari perumusan misi, tujuan, dan kebijakan internal sekolah. Perumusan strategi memungkinkan sekolah untuk menghadapi ancaman dan peluang dalam lingkungan internal dan eksternal serta meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan.

c. Pelaksanaan Strategi

Sebagai hasil dari perumusan strategi, pelaksanaan strategi adalah proses perilaku yang terdiri dari beberapa langkah proses, seperti pengembangan program, persiapan anggaran, dan persiapan prosedur.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan manajemen strategik sekolah, dengan fokus pada identifikasi kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama implementasi strategi. Selama proses evaluasi, strategi baru dirumuskan kembali untuk menyempurnakan strategi sebelumnya. Sedangkan pengendalian adalah proses membatasi kebebasan bergerak para praktisi manajemen untuk mematuhi rencana yang baru disusun.

Dalam penelitian ini, teori manajemen strategi digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai langkah strategis dalam mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui perspektif manajemen strategi, dapat dianalisis apakah pemerintah telah melakukan identifikasi masalah secara tepat, menyusun program yang sesuai kebutuhan pasar kerja, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengevaluasi hasil kebijakan untuk memastikan strategi yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja terdidik.

2.1.5 Teori/Konsep Pengangguran Terdidik

Menurut Sukirno (dalam Widyawati Ralita, 2025:208) pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang yang termasuk dalam kelompok usia kerja, yakni rentan usia 15-64 tahun yang berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkannya. Ini adalah keadaan di mana individu menginginkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.

Selain itu, Muhdar (dalam Iswoyo, 2024:114) juga mengatakan bahwa pengangguran adalah ketika seseorang termasuk dalam kelompok usia kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja, namun belum berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai. Muhdar menjelaskannya lebih dalam bahwa pengangguran merupakan individu yang berada dalam kelompok usia kerja dan berusaha mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diharapkan (Iswoyo, 2024:114).

Sukirno (dalam Widyawati Ralita, 2025:208) menganggap pengangguran sebagai masalah yang berdampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi menghambat produktivitas dan pendapatan masyarakat, menyebabkan kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya. Penurunan daya beli masyarakat juga menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan layanan.

Menurut Sumarsono (dalam Depi dan Yulmardi, 2020:126) dampak dari adanya pengangguran yaitu penganggur dapat memakan hasil produktivitas orang lain, sehingga tingkat pendapatan menjadi rendah. Dampak lain yang ditimbulkan pengangguran terhadap kegiatan perekonomian yaitu pengangguran menyebabkan

masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya, pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis pengangguran meliputi pengangguran friksional, struktural, siklis, musiman, terbuka, serselubung, dan pengangguran terdidik.

Menurut Putri (dalam Rahma, 2024:4) pengangguran terdidik terjadi karena kurang sesuai perencanaan pembangunan bidang pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja.

Menurut Sumarsono (dalam Rahma, 2024:4) bahwa pengangguran terdidik merupakan angkatan kerja yang memiliki pendidikan menengah ke atas yaitu Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang tidak bekerja. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengangguran terdidik yaitu krisis ekonomi, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik, penyediaan tenaga kerja terdidik yang tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja lebih besar dibanding kesempatan kerja.

Tingginya jumlah pengangguran terdidik disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan maka tingkat partisipasi kerja juga akan meningkat dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih tinggi, jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, maka pengangguran akan semakin meningkat. (Depi et al., 2020:126).

Selain itu dampak lain yang disebabkan dari pengangguran terdidik yaitu, pemborosan sumber daya pendidikan dan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan adalah dua persoalan yang mungkin terjadi. Selain itu, hal itu dapat mengakibatkan penurunan produksi masyarakat, terutama di kalangan pekerja terdidik. (Rosalinda, 2023:311).

Di wilayah seperti Kabupaten Kuantan Singingi, pengangguran terdidik kerap muncul akibat terbatasnya peluang kerja lokal, minimnya kapasitas sektor industri, serta dominannya sektor informal yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah lulusan sarjana maupun diploma dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dampaknya, banyak lulusan akhirnya masuk ke sektor informal, menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka, atau bahkan tetap menganggur dalam jangka waktu yang panjang.

2.1.6 Teori/Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan manusia melalui aspek umur panjang, kemampuan membaca dan menulis, pendidikan, serta kualitas hidup. IPM menggambarkan sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan, khususnya dalam hal pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek kesejahteraan. (Efendi dan Bakhtiar, 2024:1).

Menurut *United Nations Development Programme* (dalam Shobri et al., 2022:266-267), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen utama yang

mencerminkan kualitas hidup. Sebagai indikator kesejahteraan, IPM disusun melalui tiga dimensi pokok, yaitu:

1. Umur panjang dan kesehatan yang baik (*a long and healthy life*).
2. Pengetahuan (*knowledge*).
3. Taraf hidup yang layak (*decent standard of living*) (Shobri et al., 2022:266-267).

Menurut Efendi Bakhtiar (2024:7-8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu negara. Melalui IPM, beberapa aspek kesejahteraan manusia digabungkan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup penduduk. Adapun komponen utama yang membentuk IPM meliputi:

1. Harapan Hidup pada Lahir

Merupakan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai seorang bayi yang baru dilahirkan dengan asumsi tingkat kematian pada setiap kelompok umur tetap stabil pada periode tersebut. Indikator ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan serta kualitas layanan kesehatan di suatu negara. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik pula sistem kesehatan dan kondisi hidup masyarakatnya.

2. Pendidikan

- a. Harapan Pendidikan

Merupakan jumlah tahun sekolah yang diperkirakan dapat dijalani oleh seorang anak usia sekolah selama hidupnya. Indikator ini mencerminkan tingkat

akses dan peluang pendidikan di suatu negara, serta digunakan untuk menilai potensi keterjangkauan pendidikan bagi anak dan remaja di masa mendatang.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Merupakan jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan aktual di kalangan orang dewasa dan digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat telah memperoleh pendidikan serta kualitas sistem pendidikan yang berjalan.

3. Pendapatan

Diukur melalui *Gross National Income* (GNI) per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Indikator ini menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu negara dan digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi serta kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa (Efendi, Bakhtiar, 2024:7-8).

Dalam konteks penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi landasan penting untuk memahami kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuantan Singingi. Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup memberikan gambaran mengenai kemampuan masyarakat untuk memasuki dunia kerja. Dimensi pendidikan sangat berpengaruh terhadap munculnya pengangguran terdidik, karena semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tidak selalu

diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Sementara itu, dimensi kesehatan dan standar hidup mencerminkan kondisi kesejahteraan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia di daerah telah mendukung atau belum mampu mengurangi tingkat pengangguran terdidik, sehingga menjadi pijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.

2.1.7 Teori/Konsep Strategi Kebijakan

Menurut Slameto (dalam Mighwar dan Nurlatipah, 2023:85) strategi ialah perencanaan untuk memanfaatkan dan menggunakan kemampuan dan fasilitas untuk mengembangkan dan meningkatkan sebuah efektifitas dan efisiensi. Dapat diartikan bahwa strategi adalah planing besar dari sebuah kelompok organisasi yang menaungi suatu tantangan yang ada dimasa sekarang sambil mencapai visi dan misi masa depan organisasi. Strategi adalah pola umum dari runtutan salah satu rangkaian kegiatan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Strategi merupakan keseluruhan hubungan yang berkaitan dengan implementasi suatu gagasan, rencana, dan kegiatan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Melihat strategi yang baik adalah strategi yang dikoordinasikan oleh tim kerja, memiliki tema, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang selaras dengan prinsip ide implementasi yang baik, pendanaan yang efektif, dan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. (Mighwar dan Nurlatipah, 2023:85).

Strategi kebijakan merupakan konsep sentral dalam administrasi publik karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai kebijakan. Secara umum, strategi kebijakan dipahami sebagai serangkaian pendekatan, metode, dan langkah terencana yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai secara efektif. Pada era modern, para ahli kontemporer memberikan pandangan yang lebih relevan dengan perubahan abad ke-21, seperti perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Menurut Easton (dalam Sasmito, 2020:48) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan (dalam Sasmito, 2020:48) juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Strategi kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, mencegah dan mengatasi pencemaran, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi Kebijakan dalam tata kelola lingkungan harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan. (Ade, 2023:484).

Strategi kebijakan adalah sebuah struktur kerja yang memandu serta mengontrol pilihan yang menentukan dan memandu organisasi. Strategi menjadi sebuah seni untuk menggunakan keterampilan serta menjadi sumber daya sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya dengan hubungan yang sangat baik di lingkungannya. (Mighwar dan Nurlatipah, 2023:84).

Strategi kebijakan merupakan bagian dari keputusan pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan. Dalam konteks modern, strategi kebijakan perlu memperhitungkan dinamika politik, hubungan pusat–daerah, serta respons terhadap tuntutan masyarakat dan menekankan perlunya kejelasan tujuan, prioritas kebijakan, dan kemampuan untuk mengelola konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Darafarin (2022:62) menjelaskan bahwa strategi kebijakan publik merupakan cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan secara berkesinambungan dalam siklus kebijakan. Ia menyoroti pentingnya perumusan kebijakan yang matang, implementasi yang fleksibel, dan evaluasi berkala agar kebijakan tetap relevan dengan perubahan lingkungan.

Pandangan strategis lainnya dikemukakan oleh Fischer, Miller, dan Sidney (dalam Yuliani et al, 2022:169) yang menegaskan bahwa strategi kebijakan modern perlu berbasis *evidence-based policy*. Mereka menyatakan bahwa pemanfaatan data, penelitian, dan analisis mendalam merupakan faktor kunci

untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan akuntabel. Dengan demikian, strategi kebijakan tidak hanya mengandalkan intuisi atau pertimbangan politik, tetapi juga bukti empiris.

Secara keseluruhan, berbagai pandangan ahli abad ke-21 tersebut menunjukkan bahwa strategi kebijakan merupakan konsep yang multidimensi. Ia tidak hanya mencakup tahap perumusan atau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga analisis berbasis data, koordinasi kelembagaan, penggunaan instrumen yang tepat, serta adaptasi terhadap perkembangan digital. Dengan demikian, strategi kebijakan dapat dipahami sebagai pendekatan menyeluruh yang membantu pemerintah mencapai tujuan publik secara terencana, efektif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam penelitian ini, teori strategi kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah merancang upaya yang sistematis dalam menangani pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi. Strategi kebijakan dipahami sebagai rangkaian proses mulai dari merumuskan masalah, memilih instrumen yang sesuai, membangun koordinasi antarlembaga, hingga melakukan evaluasi secara terus-menerus. Berdasarkan pandangan Dunn, Howlett & Ramesh, Peters, Dye, dan Nugroho (dalam Star et al, 2025:215) strategi kebijakan tidak hanya berbentuk rencana teknis, tetapi merupakan pendekatan komprehensif yang menuntut analisis berbasis bukti, kerja sama kelembagaan, keputusan yang terarah, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lokal.

2.1.8 Teori Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi pemerintahan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dan berperan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Melalui administrasi ini, pemerintah daerah menjalankan kewenangan untuk mengatur serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya berdasarkan prinsip desentralisasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Administrasi pemerintahan daerah tidak hanya mencakup prosedur birokratis, tetapi juga mencakup proses manajerial yang meliputi perencanaan, implementasi, pengendalian, hingga evaluasi terhadap seluruh aktivitas pemerintahan daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, administrasi pemerintahan daerah berfungsi sebagai wadah untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan nyata di daerah, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Khikmwanto et al, 2024:10).

Menurut Fernanda et al, (2023:20) dalam praktiknya, administrasi pemerintahan daerah mencakup pengelolaan berbagai urusan seperti pemerintahan umum, pembangunan ekonomi, pelayanan sosial, pengelolaan keuangan dan aset, serta pembinaan aparatur. Keseluruhan kegiatan tersebut membutuhkan sistem administrasi yang tertata dan profesional agar proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pelaporan hasil dapat dilakukan secara terukur. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan katalisator perubahan sosial-ekonomi di wilayahnya. Oleh karena itu, kualitas administrasi pemerintahan daerah sangat

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah. Daerah yang memiliki sistem administrasi yang baik cenderung mampu berinovasi, menciptakan efisiensi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya.

Sementara itu, Administrasi pemerintahan daerah juga dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan urusan pemerintahan di daerah yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik daerah. Administrasi pemerintahan daerah juga dapat didefinisikan sebagai sistem kerja sama antar unit pemerintahan dan masyarakat daerah untuk mengatur, mengurus, dan melayani kepentingan publik secara mandiri sesuai prinsip otonomi daerah. (Fernanda et al, 2023:22).

Dengan demikian, administrasi pemerintahan daerah merupakan instrumen utama pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur hubungan antar pemerintah daerah, berinovasi, menciptakan efisiensi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya. (Fernanda et al, 2023:23).

Menurut Nurcholis (dalam Fernanda et al, 2023:240) menekankan bahwa administrasi pemerintahan daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan urusan publik pada level lokal yang dijalankan melalui struktur organisasi pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi. Menurut pandangannya, kualitas dan efektivitas administrasi di daerah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kewenangan serta sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Suwanda (dalam Fernanda et al, 2023:209) menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan daerah adalah sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen publik modern. Sistem ini berfokus pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan lokal, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memaksimalkan potensi daerah melalui berbagai inovasi kebijakan.

Administrasi pemerintahan daerah memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan layanan yang responsif, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tingkat kepuasan publik semakin meningkat.
3. Mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Administrasi pemerintahan daerah berperan sebagai mekanisme penggerak bagi pembangunan ekonomi, sosial, serta kebudayaan lokal agar berjalan seimbang dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindak pemerintahan, mulai dari kebijakan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama administrasi pemerintahan daerah adalah menciptakan kondisi yang

mendukung peningkatan taraf hidup, kemakmuran, serta kualitas hidup penduduk di wilayahnya.

Dalam konteks penelitian ini, teori administrasi pemerintahan daerah digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangan, mengelola sumber daya, serta menyelenggarakan pelayanan publik dalam upaya mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan daerah harus mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan secara efektif sesuai prinsip otonomi daerah. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis sejauh mana pemerintah daerah melalui perangkat daerah mampu mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan, merancang strategi yang tepat, mengimplementasikan program penanggulangan pengangguran, serta mempertanggungjawabkan hasil kebijakan kepada masyarakat.

Dengan demikian, teori administrasi pemerintahan daerah memberikan kerangka untuk menilai efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang responsif, pembangunan yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok lulusan terdidik yang belum terserap di pasar kerja.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kajian dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan baik dari segi tema, pendekatan, maupun objek kajian. Penelitian-penelitian tersebut membahas berbagai strategi dan upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran terdidik melalui program

pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Penelitian terdahulu ini menjadi landasan bagi peneliti dalam memahami permasalahan pengangguran terdidik serta sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis strategi yang diterapkan pemerintah daerah.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Hasil
1	Nadia Yulia Lestari & Khairul Amri (2023)	Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru	Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mengatasi pengangguran terdidik melalui pelatihan kerja, job fair, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kerja sama dengan perusahaan. Pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri, serta rendahnya partisipasi perusahaan.
2	Siswoyo, Asaibani, & Ahmad Soleh (2023)	Model dan Strategi Pengentasan Pengangguran Terdidik (Studi Kasus di Provinsi Jambi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi memerlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Hasil
			usaha agar lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3	Natalia Mariana Kamsina Tokan, Jeni J. Therik, & Aspri Budi Oktavianto (2025)	Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Kota Kupang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang berperan dalam mengurangi pengangguran terdidik melalui pelatihan kerja, penyediaan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan program peningkatan keterampilan. Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya peluang kerja yang tersedia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam upaya mengatasi pengangguran terdidik melalui berbagai program, seperti pelatihan kerja, penyelenggaraan job fair, penyediaan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja dan memperluas akses lulusan terhadap peluang kerja yang tersedia. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pengangguran terdidik memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan dan sektor usaha.

Namun, berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengatasi pengangguran terdidik tidak hanya bergantung pada penyediaan program ketenagakerjaan, tetapi juga memerlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari beberapa teori di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran untuk menggambarkan keterkaitan antara permasalahan pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasinya.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah fenomena pengangguran terdidik yang masih terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi.. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga pada pembangunan daerah secara umum.

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam (Tsuraya et al, 2024:35) menjelaskan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah karena sifatnya sementara, maka perlu di buktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pengaruh penting terhadap penurunan pengangguran terdidik. Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif. Selain itu, dukungan sumber daya

yang memadai, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program penanggulangan pengangguran terdidik di daerah tersebut.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang diteliti sehingga dapat diukur secara nyata di lapangan. Penelitian ini memiliki tiga konsep yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Berikut uraian dari masing-masing definisi operasionalnya:

2.4.1 Perencanaan

Menurut Fred R. David (dalam Muharam et al, 2025:25) perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen strategi yang berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Pada tahap ini, organisasi merumuskan visi dan misi sebagai pedoman utama, kemudian melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang serta merumuskan alternatif strategi yang paling sesuai dengan kondisi organisasi. Perencanaan strategi menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program kerja agar pelaksanaan organisasi berjalan secara terarah dan sistematis.

2.4.2 Pelaksanaan

Menurut Fred R. David (dalam Muharam et al, 2025:27) pelaksanaan merupakan tahap penerjemahan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata dan kegiatan operasional organisasi. Tahap ini mencakup penetapan tujuan tahunan, penyusunan kebijakan, pengembangan program kerja, serta pengalokasian sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Keberhasilan pelaksanaan strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan, koordinasi antarbagian, serta komitmen seluruh anggota organisasi dalam menjalankan strategi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.4.3 Evaluasi

Menurut Fred R. David (dalam Muharam et al, 2025:27) evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas dan keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kembali faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi, mengukur kinerja dan hasil yang telah dicapai, serta membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau hambatan dalam pelaksanaan strategi, maka perlu dilakukan tindakan korektif dan penyesuaian strategi. Evaluasi strategi bertujuan agar organisasi tetap adaptif, efektif, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan

2.5 Operasional Variabel

Menurut Widodo (dalam Polij, 2023:17) definisi operasional adalah kegiatan pengukuran variabel penelitian dilihat berdasarkan ciri-ciri spesifik yang

tercermin dalam dimensi-dimensi atau indikator-indikator variabel penelitian. Definisi operasional Definisi operasional digunakan untuk memperjelas batasan variabel, menyeragamkan pemahaman peneliti, serta memudahkan pengumpulan dan pengolahan data penelitian. Berikut operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel II. 1: Konsep variabel Analis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.	1. Perencanaan	a. Penetapan tujuan	Ordinal
			b. Penyusunan strategi dan langkah kerja yang jelas	
			c. Identifikasi pemasalahan pengangguran terdidik	
		2. Pelaksanaan	a. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana	Ordinal
			b. Pemanfaatan sumber daya	
			c. Kendala dalam pelaksanaan	
		3. Evaluasi	a. Penilaian terhadap capaian program	Ordinal
			b. Monitoring pelaksanaan program	
			c. Tindak lanjut hasil evaluasi	

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Waruwu (2024:200) penelitian kualitatif adalah aktivitas yang berhubungan dengan tindakan pengamatan, berusaha mempelajari sesuatu secara alamiah, memahami secara mendalam, atau menafsirkan, memaknai fenomena dengan mendeskripsikan, memecahkan kode, menerjemahkan, dan memahami konteks secara alami.

Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu kondisi, kejadian, atau fenomena secara teratur, berdasarkan fakta yang ada, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Istilah deskriptif mengandung makna menguraikan atau menjelaskan suatu fenomena apa adanya, tanpa adanya perlakuan khusus maupun tindakan eksperimen terhadap objek penelitian. (Mao dan Huo, 2023:37).

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (dalam Haki et al, 2024:19) informan adalah orang yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif karena dianggap paling mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai situasi sosial atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III. 1: Daftar Informan Penelitian tentang Analisis Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja	1	1	10%
2	Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda	1	1	10%
3	Lulusan terdidik yang menganggur	5	5	80%
Jumlah		7	7	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui dua teknik, yaitu teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Moleong (dalam Andriani et al., 2025:4) purposive sampling merupakan cara pemilihan informan yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian kualitatif, sehingga informan tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat.

Sementara itu Snowball sampling atau teknik bola salju merupakan Snowball sampling adalah teknik pemilihan informan di mana peneliti meminta informan awal untuk merekomendasikan informan lain yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan. Teknik ini digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses, tersembunyi, atau tidak memiliki kerangka sampel yang jelas.(Himan Khusnul muh et al., 2026:5).

Dalam penelitian ini, informan yang berasal dari unsur pemerintah, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki kewenangan, pengalaman, serta pemahaman yang mendalam terkait perumusan dan pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran terdidik.

Sedangkan informan dari kalangan lulusan terdidik yang menganggur ditentukan menggunakan teknik snowball sampling. Pemilihan teknik ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mengidentifikasi secara langsung populasi sasaran, sehingga penentuan informan dilakukan secara bertahap melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih luas dan mendalam serta mampu menggambarkan kondisi nyata yang dialami oleh pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Sugiyono (dalam Ulinuha, 2022:5508) mendefinisikan data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung oleh peneliti atau pengumpul data. Data primer berasal dari wawancara dan observasi langsung dengan pihak terkait yang memberikan informasi secara langsung.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (dalam Ulinuha, 2022:5508) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang tidak memberikan datanya secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data. Data ini didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merancang dan menerapkan strategi untuk mengatasi pengangguran terdidik.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Sungai Jering, Teluk Kuantan. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam mengatasi pengangguran terdidik.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Menurut Moleong (dalam Putri dan Murhayati, 2025:5) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3.6.2 Observasi

Menurut Putri dan Murhayati, (2025:4) observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan keadaan lapangan/subjek penelitian guna mendapatkan data fenomena yang terjadi secara nyata.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Putri dan Murhayati (2025:9) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

3.6.4 Gabungan

Menurut Putri dan Murhayati (2025:9) teknik pengumpulan data gabungan merupakan cara pengumpulan data dengan mengombinasikan beberapa teknik yang bersumber dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif, baik dilakukan secara simultan maupun bertahap, guna memperoleh data yang lebih menyeluruh, mendalam, serta saling melengkapi.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis Data Menurut Miles and Huberman (dalam Zulfirman, 2022:149) analisis data model interaktif ini memiliki 3 (tiga) komponen yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Miles and Huberman (dalam Zulfirman, 2022:149) reduksi data yaitu proses menyaring, merangkum, dan mengorganisir data mentah agar fokus pada hal-hal yang penting dan relevan.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menata data dalam bentuk naratif, matriks, atau visual untuk mempermudah penarikan kesimpulan. (Zulfirman, 2022:149).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah interpretasi terhadap data yang telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah dan memastikan validitasnya melalui triangulasi data.(Zulfirman, 2022:150).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2: Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Analisis Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Revisi Proposal																								
6	Pembuatan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Ujian Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau yang terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, dan Kuantan Singingi. Secara administratif, kabupaten ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang sebelumnya dinilai memiliki potensi namun belum tergarap secara optimal.

Secara historis, wilayah Kuantan Singingi memiliki akar budaya yang kuat dari masyarakat Melayu yang telah lama mendiami daerah sepanjang aliran Sungai Kuantan. Kehidupan masyarakat pada masa lampau sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, serta aktivitas perdagangan tradisional yang berkembang di sepanjang sungai. Selain itu, daerah ini juga dikenal dengan tradisi budaya yang khas, seperti Pacu Jalur, yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan menjadi identitas masyarakat Kuantan Singingi. Seiring dengan terbentuknya sebagai daerah otonom, Kabupaten Kuantan Singingi terus

mengalami perkembangan dalam berbagai sektor, baik pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi antara 0°00' Lintang Utara sampai 1°00' Lintang Selatan dan antara 101°02' sampai 101°55' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah $\pm 7.656 \text{ km}^2$ atau sekitar 7,81% dari total luas wilayah Provinsi Riau, dengan jarak dari garis pantai berkisar $\pm 120 \text{ km}$ dan ketinggian wilayah antara 25–30 meter di atas permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

4.1.2.1 Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan

4.1.2.2 Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat

4.1.2.3 Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu

4.1.2.4 Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi

Diketahui luas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 7.656,03 km^2 . Secara administratif, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 desa. Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Singingi dengan luas sekitar 1.953,66 km^2 , sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas sekitar 114,29 km^2 .

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C hingga 36°C, sedangkan suhu minimum berkisar antara 19,2°C hingga 22°C. Curah hujan di wilayah ini berkisar antara

44,49–433,19 mm per tahun, dengan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari dan musim kemarau berlangsung pada bulan Maret hingga Agustus. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura di daerah ini. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Köppen, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam tipe iklim Af (tropis basah), yaitu daerah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun (lebih dari 60 mm per bulan atau sekitar 1.500 mm per tahun). Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang subur dan sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografis, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kondisi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi hingga kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Ketinggian wilayah berkisar antara 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata ketinggian sekitar 32,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi yang bervariasi ini menyebabkan adanya perbedaan karakteristik wilayah pada masing-masing kecamatan.

Kabupaten Kuantan Singingi juga dilalui oleh dua sungai utama, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi, serta puluhan anak sungai yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Panjang total aliran sungai yang

terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mencapai sekitar 1.518,70 kilometer.

Kondisi topografi yang didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas kelapa sawit, karet, dan tanaman pangan. Selain itu, keberadaan kawasan perbukitan dan pegunungan juga memberikan potensi dalam pengembangan sektor pariwisata dan konservasi sumber daya alam.

4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 Sejarah Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sebelum menjadi organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri, urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi berada di bawah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker). Pada masa tersebut, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui beberapa bidang yang terdapat dalam struktur organisasi dinas tersebut.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Penataan tersebut menghasilkan pembentukan Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang terpisah dan memiliki kewenangan khusus dalam menangani berbagai urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sejak berdiri secara mandiri, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan. Ruang lingkup tugas yang dilaksanakan meliputi pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi tingkat pengangguran melalui berbagai program ketenagakerjaan. Keberadaan dinas ini juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya bagi pencari kerja, tenaga kerja, maupun pelaku usaha yang membutuhkan layanan di bidang ketenagakerjaan.

Saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta pengembangan ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu bersaing di dunia kerja. Dengan demikian, dinas ini memiliki peran strategis

dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.2 Visi dan Misi

4.2.2.1 Visi

Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026

4.4.2.2 Misi

- 4.4.2.2.1 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman, serta memiliki semangat dan jiwa batobo dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
- 4.4.2.2.2 Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan, dan demokratis.
- 4.4.2.2.3 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
- 4.4.2.2.4 Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah.
- 4.4.2.2.5 Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.2.3 Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya kepada siapa mereka bertanggung jawab akan tugas yang dilakukan.

Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi dalam struktur organisasi.

Berikut merupakan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi:

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

4.2.3.1 Kepala Dinas

4.2.3.2 Sekretaris, membawahkan:

4.2.3.1.1 Kasubbag umum

4.2.3.1.2 Kasubbag Program dan Keuangan

4.2.3.3 Kabid Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan

Kerja,, membawahkan:

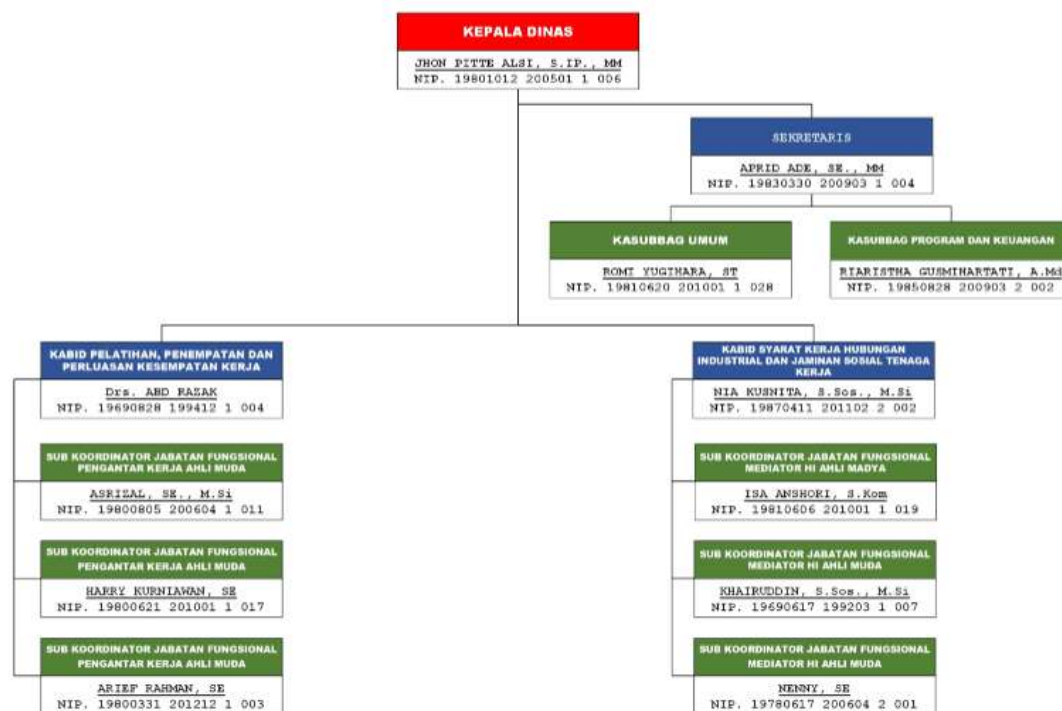
4.2.3.3.1 Sub coordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

4.2.3.4 Kabid Syarat Kerja Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, membawahkan:

4.2.3.4.1 Sub Koordinator Jabatan Fungsional Mediator Ahli Muda

Gambar IV Struktur Organisasi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi



Berikut merupakan uraian bagian kerjanya:

4.2.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, Kepala Dinas bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan program kerja, serta pembinaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

4.2.3.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkantoran, perencanaan

program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta pelayanan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

4.2.3.3 Kasubbag Umum

Kasubbag Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan aset, serta pelayanan rumah tangga kantor guna menunjang kelancaran kegiatan dinas.

4.2.3.4 Kasubbag Program dan Keuangan

Kasubbag Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan, mengelola administrasi keuangan, melakukan penatausahaan anggaran, serta menyusun laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

4.2.3.5 Kabid Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, serta pengembangan dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja.

4.2.3.6 Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi pasar kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja, melakukan pendataan pencari kerja dan lowongan pekerjaan, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan dalam rangka penyaluran tenaga kerja.

4.2.3.7 Kabid Syarat Kerja, Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap hubungan industrial, penerapan syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4.2.3.8 Sub Koordinator Jabatan Fungsional Mediator Ahli Muda

Sub Koordinator Jabatan Fungsional Mediator Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memberikan pembinaan kepada pekerja dan pengusaha, serta membantu terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara kedua belah pihak.

4.2.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang

4.2.4.1 Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.4.2 Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.4.2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.

4.2.4.2.2 Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

4.2.4.2.3 Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan ketenagakerjaan.

4.2.4.2.4 Pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

4.2.4.2.5 Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

4.2.4.2.6 Pelaksanaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

4.2.4.2.7 Pelaksanaan administrasi dinas.

4.2.4.2.8 Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program ketenagakerjaan.

4.2.4.3 Wewenang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Beberapa wewenang yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

4.2.4.3.1 Menyusun dan melaksanakan program ketenagakerjaan daerah.

4.2.4.3.2 Menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja.

4.2.4.3.3 Memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.

4.2.4.3.4 Memfasilitasi hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

4.2.4.3.5 Melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja dan perusahaan.

4.2.4.3.6 Mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran.

4.2.4.3.7 Melaksanakan pengumpulan data serta evaluasi kondisi ketenagakerjaan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi pengangguran terdidik telah dilaksanakan melalui perencanaan program, pelaksanaan pelatihan kerja, penyediaan informasi lowongan kerja, serta kegiatan evaluasi program. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Dinas Tenaga Kerja, dalam upaya mengatasi pengangguran terdidik.

6.2.1 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan kualitas perencanaan program dengan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat dan menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

6.2.2 Dinas Tenaga Kerja perlu memperluas kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, serta pihak swasta lainnya guna meningkatkan peluang kerja bagi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi.

- 6.2.3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai agar program-program penanggulangan pengangguran terdidik dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- 6.2.4 Dinas Tenaga Kerja perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program ketenagakerjaan sehingga masyarakat, khususnya pengangguran terdidik, dapat memanfaatkan berbagai program yang tersedia secara optimal.
- 6.2.5 Evaluasi terhadap program-program ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti sebagai dasar penyempurnaan program agar lebih efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Dan Y. R. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*.
- Ade, N. G. (2023). *Strategi Kebijakan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Kelola Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. 5, 483–493.
- Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 6(4), 6238–6247. <https://doi.org/10.54373/Imej.V6i4.3783>
- Anis Ribcalia Septiana Dkk. (2023). *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi*.
- Arbi, A. (2022). *Role Of Local Government In The Implementation Of Good Government*. 14. <https://doi.org/10.4108/Eai.28-5-2022.2320564>
- Darafarin, S. (2022). An Examination Of Policy And Scope Of Familiarity With Public Policy-Making. *Journal Of Public Policy And Administration*, 6(2), 62. <https://doi.org/10.11648/J.Jppa.20220602.11>
- Depi,Yulmardi, H. (2020). *Pengaruh Upah , Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2015*. 15(1), 125–132.
- Efendi, Bakhtiar, Dkk. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi* (M. Jannah (Ed.)). Tahta Media Group.
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i3.5423>
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2409. <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i3.5423>
- Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. 11.
- Haki, U., Prahastiwi, E. D., & Selatan, U. T. (2024). Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.46306/Jurinotep.V3i1.67>
- Himan Khusnul Muh Et Al. (2026). *No Title*. 5(2), 1688–1696.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik* (Z. Bahar Rachman (Ed.)). Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Iswoyo, F. (2024). *Pengangguran Dan Mandat Budaya*. 2(1), 112–123.
- Jamaludin, Nur, Dkk. (2023). *Manajemen Strategik*.

- Khairina, Dan S. M. (2023). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*. 10(2), 160–161.
- Khikmwanto, K., Renaldy, R., & Riyadi, S. (2024). *Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perkembangan Ilmu Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.62383/Aktivisme.V1i4.462>
- Mao, Z., & Huo, W. (2023). Descriptive Study. *Textbook Of Clinical Epidemiology: For Medical Students*, 37–60. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3622-9_3
- Mighwar, M. Al, & Nurlatipah, D. (2023). *Implementasi Model Strategi Kebijakan Publik Pada Pendidikan Di Sekolah Dasar*. 2(2), 83–94.
- Muharam, S. Et Al. (2025). *Penerapan Strategi Organisasi Dalam Penyusunan Rencana Strategis: Sebuah Perspektif Fred R. David*. 10(2).
- Nugraha, Dkk. (2022). *Teori Administrasi* (Y. A. Sari Diana Purnama (Ed.)). Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Nugroho Priyono Dwi, & S. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Polii, C. G. Dkk. (2023). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Tomohon*. 23(5), 13–24.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.
- Rahma, M. Dkk. (2024). *Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2022*. 07, 1–10.
- Rosalinda, M. Et Al. (2023). *Tingkat Pengangguran Terdidik (Persentase)*. Vii, 309–320.
- Sasmito, C. Dkk. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*.
- Shobri, H., Hasibuan, K. S., & Nasution, M. D. M. (2022). *Jurnal Ekonomi Islam Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara*. 4(2), 264–274.
- Star, Y., Pradana, A., Khasanah, A. N., Anjani, A. Y., & Sutrisno, D. (2025). Basic Concepts Of Strategic Management In The Public Sector: A Theoretical Study And Its Relevance In Governance In Indonesia. *Return : Study Of Management, Economic And Bussines*, 4(8).
<https://doi.org/10.57096/Return.V4i8.398>
- Suardita, I. K. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. 5.
- Suwitri, S. (N.D.). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. 1, 1–51.
- Tsuraya, F. G., Rizkiani, S. T., & Kusumaningrum, H. (2024). *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pendidikan Yang Kuat*. 2(1), 39–46.
- Ulinuha, M. Et Al. (2022). *Pengaruh Produktivitas Terhadap Pendapatan*

- Konveksi Bumiayu Beauty Of Java (Studi Empiris Produksi Tahun 2020-2021).* 6(3), 5502–5514.
- Untari, D. T. (N.D.). *Modul Manajemen Strategik*.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.* 5, 198–211.
- Widyawati Ralita, Dkk. (2025). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2024.* 4(September).
- Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi*. Widya Gama Press.
- Yuliani, I., Larasati, E., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2022). Evidence-Based Policy: Data's Use In Supporting Public Policy Process. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(3), 1699–1705. <https://doi.org/10.55324/Iss.V2i3.341>
- Zulfirman, R. (2022). *Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan.* 3(2), 147–153.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

**Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi
Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.**

Kepada : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Identitas Peneliti

Nama : Rivi Kania
NPM : 220411078
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

**D. Pertanyaan wawancara untuk Kepala Dinas atau Pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

I. Perencanaan Program Ketenagakerjaan

1. Bagaimana Bappeda menetapkan tujuan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi? Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana peran Bappeda dalam penyusunan strategi dan langkah kerja pemerintah daerah untuk mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi? Berikan Ulasan

.....
.....

3. Bagaimana Bappeda mengidentifikasi permasalahan pengangguran terdidik yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan? Berikan Ulasan

.....
.....

II. Pelaksanaan Program ketenagakerjaan

1. Bagaimana peran Bappeda dalam memastikan pelaksanaan program mengatasi pengangguran terdidik berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana Bappeda mengoordinasikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program penanggulangan pengangguran terdidik? Berikan Ulasan

.....
.....

3. Menurut Bappeda, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran terdidik? Berikan Ulasan

.....
.....

III. Evaluasi Program Ketenagakerjaan

1. Bagaimana Bappeda menilai capaian program pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi? Berikan Ulasan

.....
.....

2. Bagaimana Bappeda melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program mengatasi pengangguran terdidik? Berikan Ulasan

.....
.....

3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Bappeda berdasarkan hasil evaluasi program penanggulangan pengangguran terdidik? Berikan Ulasan

.....
.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Lulusan terdidik yang sedang mencari pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Rivi Kania
NPM	: 220411078
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.

4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

E. Pertanyaan wawancara untuk lulusan terdidik yang sedang mencari pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Perencanaan Program Ketenagakerjaan

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja terdidik?

Berikan Ulasan

.....
.....

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik di lingkungan sekitar?

Berikan Ulasan

.....
.....

II. Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengikuti program yang dilakukan Pemerintah Daerah?

Berikan Ulasan

.....
.....

2. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi dalam mendapatkan pekerjaan?

Berikan Ulasan

.....
.....

III. Evaluasi Program Ketenagakerjaan

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah program pemerintah sudah membantu dalam mengurangi pengangguran terdidik?

Berikan Ulasan

.....

.....

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi



Wawancara dengan Sub Koordinator Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda



Wawancara dengan Informan Lulusan Diploma III (D3)



Wawancara dengan Informan Lulusan Diploma III (D3)



Wawancara dengan Lulusan Terdidik Sarjana (S1)



Wawancara dengan Lulusan Terdidik Sarjana (S1)



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 126/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang** :-
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
 - b. Nama : SARJAN M, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rivi Kania
NPM : 220411078

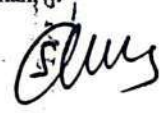
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran di Kalangan S1 di Kab. Kuantan Singingi (Studi kasus Kec. Kauantan Tengah)

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025

Dekan,


SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 20 April 2026

No : 046/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026

Lampiran : Ada/-Satu Set

Perihal : Surat Permohonan Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk
Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rivi Kania

NPM : 220411078

Fakultas : Ilmu Sosial

Program Studi : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Penggangguran Terdidik di Kab. Kuantan Singing

Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS



SARJAN M. S.Sos. M.Si
NIDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Email : disnakerkuansing2023@gmail.com, Website : <https://disnaker.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 560/ Disnaker-Sekr/2026/03

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RIVI KANIA
NIM : 220411078
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
ALAMAT : TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI PENGANGGURAN TERDIDIK DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI.

Berdasarkan Surat Nomor : 117/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026, tanggal 22 April 2026 tentang Rekomendasi pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 12 Juni 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi


JHON PITTE ALSI, S.IP.,MM
NIP. 19801012 200501 1 006



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : RIVI KANIA

NPM : 220411078

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. ALSAR ANDRI S.Sos.,M.Si

2. SARJAN M, S.Sos.,M.Si

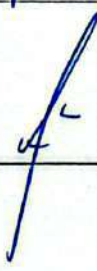
JUDUL : ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI PENGANGGURAN TEDIDIK DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA
KERJA)

Mulai Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	19/11-2015	Revisi cover proposisi later Bab 3			
	26/11-2015	Revisi Bab 3			
	27/11-2015	Revisi Bab 3 dan Bab 4			

Revisi Bab 3
dan Bab 4

		Rebaili fursor pogor. p. l. r. p. l. r.		/	
		Papila. t. s. l. f. l. p. l. r. j. l. r. C. l. r. u. r.		/	
		Al. l. r. d. i. j. i.		f	
			Ang		
			Ang		
			Ang		
			Ang		
			Ang		
	m/20	m	Ang		

No	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	7 Juli 2026	Perdalam hasil analisa			
	15/ Juli 2026	Uji Kesiapan Runt Ketersediaan Runt			
		Uji Kesiapan Publikasi			
	16/ Juli 26	Perbaiki Penulisan			
					
					
					
					

	17/ Juli 2026	Perbaiki Penulisan	Aug		
			Aug		
	18/ Juli 2026	Revisi Pembahasan	Aug		
	19/ Juli 2026	Perbaiki akhir	Aug		
	20/26 7	Am	Aug		



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rivi Kania

NPM : 220411078

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pengangguran
Terdidik di Kab. Kuantan Singingi (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja)

Hari/Tgl Ujian : Jumat / 13 Februari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Rivi Kania**

NPM : 220411078

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran
Terdidik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Senin / 10 Agustus 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rivi Kania
Tempat/Tanggal Lahir : Sitorajo, 04 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sitorajo Kari
Pendidikan



1. Sekolah Dasar Negeri 021 Sitorajo Kari
2. SMP Negeri 3 Teluk Kuantan
3. SMA Negeri 1 Teluk Kuantan

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 12 Juli 2026

Rivi Kania
NPM. 220411078